



KPK Turun Tangan Usut Dana Desa Fiktif

JAKARTA, SP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mendalami dugaan korupsi dana desa fiktif di Kabupaten Konawe yang ditemukan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Perkara ini diduga merugikan keuangan negara atas alokasi dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2016-2018.

Juru bicara KPK Febri Dianyah mengatakan pihaknya telah menjalankan supervisi dengan kepolisian setempat. Ia menduga ada 34 desa bermasalah, tiga di antaranya fiktif, sisanya memang benar-benar ada tetapi tanggal

surat keputusan (SK) pembentukannya dimanipulasi.

"Saat desa tersebut (dibentuk) sudah ada moratorium dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Untuk mendapatkan dana desa, (SK) dibuat tanggal pembentukan *backdate* (memundurkan tanggal)," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (6/11).

Senin, 24 Juni 2019, polisi, dan KPK menggelar perkara di tahap penyelidikan di Mapolda Sultra. Kedua pihak menyimpulkan kasus naik ke tahap penyidikan disertai pengambi-

lan keterangan ahli hukum terkait ada atau tidaknya pidana dalam memanipulasi tanggal SK pembuatan desa.

"Proses pembentukan desa yang berdasarkan peraturan daerah yang dibuat dengan tanggal mundur merupakan bagian dari tindak pidana," tutur dia.

Sehari kemudian, pimpinan KPK dan Kapolda Sultra kala itu, Brigjen Iriyanto bertemu. Dalam pertemuan itu, KPK diminta membantu mendatangkan ahli pidana. "Kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama, (Kamis) 16 September 2019." (med/dti/bob)